

Evaluasi program Makassar Ta' Tidak Rantasa di Kota Makassar

Muhammad Nur Yamin¹, Muhammad Guntur², Herlina Sakawati³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Abstract. Makassar Tidak Rantasa (MTR) Program Evaluation Research in Makassar City aims to determine the consequences of a policy by describing its impact, and to assess the success or failure of a policy based on established standards. Critical and in-depth assessment because public policy is a policy process by the government that has an impact on the wider community. The design of policy evaluation study research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques using interviews and observations. Determination of informants used a purposive technique in a number of policy implementing informants and target communities at the sub-district level in the Makassar City area. Technical data analysis of interactive models from Miles, Huberman and Saldana. The results showed the success of the program in the MTR Movement in the form of the Lisa movement and Sekolahku movement had gone well even though the Mabasa movement and the Mabelo movement had not gone well. The level of effectiveness of the MTR program seems to be inadequate in terms of program effectiveness, efficiency, and adequacy, compared to aspects of equity, accuracy and responsiveness have been implemented well. The implementation of the Makassar No Rantasa Program was generally carried out well with constraints on the factors of community understanding and infrastructure that were still unfavorable so that the response of a small part of the community was still not good. This study recommends assessments of suitability, testing and evaluating the ongoing MTR policy suitable to be maintained but requires a firm attitude from the city government to enforce the rules on cleanliness and waste management.

Keywords: policy evaluation, Makassar Tidak Rantasa program

1. PENDAHULUAN

Kota besar adalah simbol kemajuan dan keberhasilan pembangunan dari berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan maupun pendidikan, sehingga memberikan konsekuensi bahwa sebagian besar kegiatan manusia berada di perkotaan, bahkan menjadi semakin banyak pendatang yang menambah permasalahan kota menjadi semakin kompleks. Salah satunya masalah kebersihan karena kurangnya kesadaran masyarakat, maka Walikota Makassar periode tahun 2014-2019 menciptakan berbagai kebijakan atau program-program guna mengatasi masalah kebersihan, keasrian dengan istilah MTR (Makassar Tidak Rantasa).

Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2014 tercatat 1.3 juta jiwa dimana dalam sehari volume sampah yang terangkut oleh 447 truk sampah milik Dinas Kebersihan dan sebanyak 700-800 ton. Jumlah itu belum termasuk yang diolah oleh masyarakat melalui bank sampah, dibakar, dan sebagainya. Inovasi Pemerintah Kota Makassar men-canangkan Program Makassar Ta' Tidak Rantasa sebagai kebijakan dari Pemerintah yang merupakan bentuk realisasi dari visi Walikota yaitu Kota Makassar menjadi Kota Dunia yang nyaman untuk semua.

Program Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa (Gemar MTR) merupakan program pencanangan cinta akan kebersihan. Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa ini merupakan gerakan moral yang diharapkan dapat merekonstruksi pemikiran rakyat akan kebersihan dan pola hidup sehat. Program ini diharapkan bisa merubah pola pikir masyarakat yang dulunya sering membuang sampah sembarang tempat dapat berubah menjadi hidup

bersih dan lingkungan Kota dapat terbebas dari masalah persampahan. Jargon Pendukung Gerakan Makassar Ta Tidak Rantasa yang digunakan adalah LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah), dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Keempat jargon ini digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam merubah pola pikir masyarakat untuk cinta kebersihan.

Keberadaan sebuah program sebagai instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang dapat dilihat dari tinjauan manajemen strategik bahwa program merupakan turunan yang berkesinambungan dari visi dan misi pemerintah daerah dimana hal tersebut memiliki tujuan sasaran, dan kebijakan yang didesain sedemikian rupa sehingga melahirkan program dan kegiatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa keberhasilan program dapat dilihat dari kesinambungan instrumen-instrumen tersebut melalui langkah evaluasi kebijakan. Dunn (2003) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut William Jones dalam Nawawi (2009) evaluasi suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan. Menurut Nugroho (2006) meskipun evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan dungsu yang dibebankan kepadanya.

Menurut Nawawi (2009) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik memiliki beberapa tujuan yaitu:

- Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Dengan evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mendeteksi serta mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Lester dan Stewart dalam Winarno (2007), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. *Tugas pertama*, adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan *tugas kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan *standard* atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun langkah dalam mengevaluasi kebijakan publik menurut Suchman dalam Winarno (2007) terdapat enam langkah yaitu:

- Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- Analisis terhadap masalah.
- Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
- Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dapat.

Menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu beberapa indikator, kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003) seperti pada Tabel 1. Penjelasan tentang mengevaluasi kebijakan yaitu dengan mengidentifikasi Tujuan Program yang akan dievaluasi. Dilihat dari Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta” Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Walikota Makassar dalam menciptakan Kota Makassar yang bersih, terampil dan aman melalui Keputusan Walikota

Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta” Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar. Adapun program yang terkait dari Program Makassar Tidak Rantasa yakni LISA (Lihat Sampah Ambil), MABASA (Makassar Bebas Sampah), MABELO (Makassar Bersih Lorong), serta Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa. Keempat program ini bertujuan merubah pola hidup masyarakat pada khususnya menjadi lebih baik dan sejahtera dan mengubah kota Makassar pada umumnya menjadi kota yang nyaman untuk semua.

Tabel 1. Indikator evaluasi kebijakan

Kriteria	Penjelasan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil ?
Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah 14 Kecamatan yang ada di Kota Makassar. Fokus penelitian Program Gerakan Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar difokuskan pada bentuk-bentuk evaluasi kebijakan terhadap program Lisa, Mabasa, Mabelo, dan Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa yaitu: efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informasi langsung yang berkaitan dengan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut: Unsur Dinas Pertamanan Kota Makassar, Kepala wilayah kecamatan, Kepala kelurahan, Perwakilan RW dan RT, dan Masyarakat setempat menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data sekunder dengan teknik dokumentasi sebagai data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, yang berkaitan dengan masalah penelitian Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar. Pengecekan keabsahan data (validitas data) dilakukan melalui triangulasi dan mengadakan *Member-check*. Teknik analisa data menggunakan model interaktif menurut Milles, Hubermann, dan Saldana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif dapat dibuat distribusi kecenderungan variabel status sosial

ekonomi orang tua. Berdasarkan kategorisasi yang dilakukan diketahui bahwa status sosial ekonomi orang tua masuk dalam kategori tinggi sebanyak 5 orang (8.33%), sedang sebanyak 53 orang (88.33%), dan rendah sebanyak 2 orang (3.33%).

Kebersihan, keindahan, dan kerapian sering kali menjadi target utama kebijakan pemerintah kota. Seperti halnya di kota Makassar yang merupakan salah satu kota metropolitan mencanangkan program menuju kota yang bersih berupa Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) sebagai program cinta akan kebersihan. Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa ini merupakan gerakan moral yang diharapkan dapat merekonstruksi pemikiran rakyat akan kebersihan dan pola hidup sehat. Program ini diharapkan bisa merubah pola pikir masyarakat yang dulunya sering membuang sampah sembarang tempat dapat berubah menjadi hidup bersih dan lingkungan kota dapat terbebas dari masalah persampahan.

Jargon Pendukung Gemar MTR dalam pelaksanaan digunakan adalah LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah), dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Keempat jargon ini digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam merubah pola pikir masyarakat untuk cinta kebersihan. Upaya mencapai hal tersebut maka perlu dievaluasi tingkat keberhasilan pemerintah kota Makassar mengeluarkan kebijakan yang dianggap mampu mengatasi masalah persampahan kota.

Tabel 2. Penilaian Evaluasi Kebijakan Gemar MTR di Makassar 2018

EVALUASI KEBIJAKAN	GERAKAN PROGRAM MAKASSAR TA' TIDAK RANTASA				Simpulan
	LISA	MABELO	MABASA	SEKOLAHKU	
EFEKTIVITAS	baik / kurang baik	kurang baik/ kurang baik	baik / kurang baik	kurang baik / baik	kurang baik
EFISIENSI	baik /baik	kurang baik/ kurang baik	kurang baik/ kurang baik	kurang baik/ kurang baik	kurang baik
KECUKUPAN	baik /baik	kurang baik/ kurang baik	kurang baik/ kurang baik	baik/ kurang baik	kurang baik
PEMERATAAN	baik /baik	baik / kurang baik	baik / kurang baik	baik /baik	Baik
KETEPATAN	baik/ kurang baik	baik / baik	baik / baik	baik /baik	Baik
RESPONSIVITAS	baik /baik	kurang baik/ baik	baik / kurang baik	baik /baik	Baik
Simpulan	baik	kurang baik	kurang baik	baik	

Gerakan Lisa (Lihat Sampah Ambil) adalah kebijakan dari Walikota Makassar yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebersihan kota Makassar, mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan terlaksana dengan baik. Lisa sebagai turunan dari program Makassar Ta' Tidak Rantasa dimana gerakan ini merupakan awal untuk menanamkan kesadaran seluruh warga kota Makassar agar peduli terhadap lingkungan. Komponen yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam mencapai Program Lisa yaitu:

- Mengadakan sosialisasi tentang program Lisa termasuk tujuan dan manfaatnya.

- Membuat stiker, spanduk, dan baliho berslogan Lisa untuk dipajang di beberapa lorong dan pinggir jalan sebagai pengingat bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan.
- Pengadaan sarana kebersihan di tiap RT dan RW seperti tong sampah organik dan anorganik dan juga bank sampah di setiap kelurahan.

Adapun tujuan dari program Lisa yaitu menjadikan Kota Makassar sebagai kota yang sehat dan bersih. Sedangkan sasaran dalam program Lisa adalah seluruh masyarakat Kota Makassar mulai dari tingkat RT dan RW di setiap kecamatan di Kota Makassar. Dampak yang ditimbulkan program Lisa ini bagi masyarakat ialah masyarakat mampu menjaga kebersihannya, masyarakat yang sadar akan kebersihan akan selalu membuat sampah pada tempatnya, dan juga mampu memilah sampah yang termasuk organik dan sampah anorganik. Akan tetapi dalam proses implementasi Program Lisa terdapat faktor yang terjadi sebelum mencapai sasaran akhir, yaitu perilaku sejumlah masyarakat yang usia remaja masih bersifat apatis dalam menjaga kebersihan. Masyarakat cenderung malas membuang sampah di tempat seharusnya. Selain itu, sarana dan prasana yang belum cukup menjadi salah satu faktor penghambat dikarenakan masyarakat yang biasanya ingin membuang sampah justru tidak mengetahui di mana tempat membuang sampah karena minimnya tempat sampah. Untuk itu pemerintah terus berusaha untuk menangani permasalahan tersebut.

Jargon aku dan sekolahku tidak rantasa mengajarkan dan memberi pelajaran kepada siswa sekolah untuk menjaga kebersihan terutama pada anak sekolah yang belum mengerti dalam hal menjaga kebersihan. Implementasi program aku dan sekolahku tidak rantasa sangat perlu diperhatikan khususnya guru sekolah harus memberi contoh yang baik untuk siswa utamanya dalam hal menjaga kebersihan, karena ketika kebersihan dapat dilaksanakan dengan baik maka pembelajaran dapat terlaksana dengan baik karena tercipta kondisi yang nyaman.

Aku dan sekolahku tidak rantasa yang disingkat menjadi sekolahku, merupakan program khusus untuk anak sekolah yang bertujuan untuk menanamkan jiwa bersih sejak dini melalui lingkungan sekolah yang diharapkan siswa mampu mengaplikasikannya juga di lingkungan rumahnya. Dalam program sekolahku ini siswa melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah yang terjadwal setiap minggu agar tercipta lingkungan sekolah yang nyaman untuk melakukan proses belajar mengajar. Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa merupakan jargon yang berada disekolah-sekolah agar selalu hidup bersih dan tidak suka membuang sampah di sembarang tempat. Pemerintah kota Makassar menyadari bahwa salah satu tempat yang paling efektif dalam membudayakan hidup bersih adalah disekolah. Sasaran dari program Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa adalah seluruh peserta didik se kota

Makassar beserta tenaga pendidik selaku aktor yang berperan memberikan arahan kepada siswa untuk merealisasikan program ini.

Dampak dari Program Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa adalah merubah pola perilaku siswa untuk hidup bersih dan mampu menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya sehingga lingkungan sekolah terlihat bersih, rapi, dan bersih selain itu juga memberikan nilai ekonomis bagi sekolah karena pihak sekolah bersama peserta didik melakukan pemilahan sampah organik dan non organik, sampah tersebut dijual kembali ke Bank Sampah dan hasil penjualannya masuk kedalam kas sekolah dan digunakan untuk merealisasikan program-program yang berkaitan dengan Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa.

Program Sekolahku tidak Rantasa penerapannya saat ini terealisasi dengan baik pada sekolah-sekolah di Kota Makassar. Program ini kembali mendorong adanya kesadaran diri siswa akan pentingnya menjaga kebersihan sejak dini, dimana mereka didorong untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah mereka. Berdasarkan hasil wawancara ternyata masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam merealisasikan program ini yaitu pendanaan yang dirasa masih kurang sehingga sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai, oleh karena itu pemerintah seharusnya mengalokasikan dana untuk program secara maksimal agar program ini dapat berjalan dengan baik.

Salah satu turunan dari program Makassar Ta' Tidak Rantasa adalah Makassar Bebas Sampah (Mabasa) yang diharapkan mampu mengatasi masalah perserakan sampah di kota Makassar. Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih sehat dan teratur. Pengumpulan dan pengangkutan sampah termasuk partisipasi masyarakat belum berjalan dengan baik, peran serta masyarakat yang kurang adalah sistem pengumpulan sampah atas kesadaran masyarakat sendiri untuk membawa sampahnya ke TPS terdekat. Organisasi terasteral (rukun tetangga dan rukun warga) sebagai organisasi yang mengkoordinir pengumpulan sampah di permukiman-permukiman yang tidak memiliki akses ke jalan utama belum berfungsi baik.

Mabasa ini ditujukan agar masyarakat kota Makassar tidak suka membuang sampah di sembarang tempat. Inilah yang mendukung program gemar MTR dalam mengatasi masalah persampahan dan merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Komponen-komponen yang dilakukan pemerintah kota Makassar dalam mencapai program Mabasa yaitu dengan:

- a. Mengadakan sosialisasi program Mabasa termasuk tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat.
- b. Kerja sama warga dan pemerintah merupakan hal yang paling berperan dalam menyelesaikan program

Mabasa. Untuk mewujudkan itu maka secara konseptual terdapat forum untuk mewadahi kerja sama tersebut forum tersebut disebut FORKASIH merupakan Forum Kampung Bersih yang merupakan inisiator ataupun pengawas pelaksanaan kegiatan Mabasa di wilayah kampung masing-masing agar terciptanya kampung bersih.

- c. Hubungan kerja sama antar pemerintah juga merupakan hal yang tak kalah penting dalam menyelesaikan Gemar MTR. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 Tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Setiap SKPD di Kota Makassar memiliki 2-3 kelurahan yang menjadi wilayah binaan. Pembagian wilayah kerja ini dibuat agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan.
- d. Organisasi Masyarakat juga memiliki andil dalam pelaksanaan program Mabasa. Ormas dalam hal ini memiliki peran dalam membuat kegiatan-kegiatan pendukung Mabasa seperti kerja bakti, penataan lorong, dan sosialisasi Mabasa itu sendiri.

Pelaksanaan Mabasa yang masih kurang baik masih diperlukan peningkatan pelibatan semua kalangan masyarakat untuk bergerak dan ikut serta dalam permasalahan sampah di Kota Makassar. Program Mabasa merupakan tindakan yang tepat jika dihubungkan dengan tujuan MTR dibuatkan perda mengenai larangan buang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan Makassar kelihatan bersih dan bukan hanya tampilan fisik tapi semua unsur yang ada di Makassar. Program Mabasa belum memberikan dampak yang baik terhadap sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan. Meskipun sudah ada perbedaan dengan sebelum program yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar 4 tahun kemarin Mabasa dengan berjalannya program mabasa jelas perbedaannya yang dulunya sampah itu menumpuk dua tiga hari sekarang dengan program ini masyarakat menjadi peduli sehingga hampir tidak kita temukan lagi sampah-sampah yang berserakan. Kondisi sekarang itu masyarakat jadi enggan karena di sekitarnya sudah bersih dan tidak mungkin mereka akan membuang lagi. Dengan demikian dalam proses implementasi Program Mabasa terdapat faktor yang terjadi kesadaran masyarakat yang beberapa masih bersifat apatis dalam menjaga kebersihan. Masyarakat cenderung malas membuang sampah di tempat seharusnya.

Program Mabasa memerlukan penggerakan lebih giat. Masih diperlukan dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah di tiap kecamatan yang ada di kota Makassar. Selain itu, Program Mabasa juga berupa pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung suksesnya program ini, seperti pengadaan tempat sampah dan bank sampah. Pelaksanaan Program

Mabasa, terdapat faktor yang menjadi penghalang dalam pelaksanaannya yaitu perilaku masyarakat yang masih kurang peduli dalam menjaga kebersihan, masyarakat cenderung tidak peduli dengan kondisi lingkungan yang kotor dan belum sadar bahaya dari lingkungan yang tidak sehat.

Makassar Bersih Lorong (Mabelo) adalah salah satu program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) mendorong partisipasi warga untuk peduli terhadap kebersihan Kota Makassar, tetapi masih harus lebih ditingkatkan lagi yakni bagaimana kita bisa mendekorasi lorong-lorong dan menata dengan baik, lorong adalah jalan yang kecil atau sempit yang ada di lingkungan ini, yang utamanya ada rumah-rumah di kiri dan kanan.

Tujuan Program Mabelo yaitu melakukan pembersihan lorong-lorong menata pot bunga, melakukan pengecatan untuk memperindah lorong, memberikan fasilitas lorong seperti tempat sampah. Program ini membuat masyarakat saling bersaing tetapi bersaing secara positif karena bersaing untuk mempercantik lorongnya menjadi lorong yang bebas sampah, nyaman, aman, ada penghijauan. Biasanya ada perlombaan Makassar bersih lorongku dimasing-masing Kecamatan atau Kelurahan. Pemerintah selalu menghimbau sekiranya lorong-lorong ditata dengan baik, dilakukan penghijauan, menanam bunga-bunga atau sayur-sayuran, akan tetapi kendala sebenarnya adalah pemerintah belum maksimal menyediakan bahan baku kepada masyarakat seperti menyediakan bibit bunga, sayuran, atau fasilitas-fasilitas yang digunakan seperti pot bunga sehingga untuk sementara ini tergantung kreativitas masyarakat menata lorong masing-masing.

Dampak Program Mabelo sudah memberikan perubahan pola kehidupan masyarakat Kota Makassar untuk peduli terhadap kebersihan lorong, mengurangi titik sampah, tetapi perubahan itu belum maksimal disebabkan kurangnya sosialisasi program dan komitmen perubahan sikap terhadap kebersihan lingkungan. Namun dalam penerapan Program Mabelo ini tentunya terdapat kendala yaitu berbagai karakter masyarakat yang sulit untuk mengubah pola pikir mereka akan pentingnya kebersihan lingkungan. Program ini dirasa masih kurang berhasil meskipun telah tepat sasaran karena masyarakat sudah merasakan dampak dari kebersihan itu sendiri. Dengan tertata dan bersihnya lorong masyarakatpun merasakan kenyamanan. Apalagi dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah seperti tempat sampah yang terpisah antara sampah basah sisa makanan, dan sampah kering (plastik) yang dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang lebih ekonomis, seperti kerajinan tangan. Jadi, bukan hanya dampak berupa kebersihan dan perubahan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, tapi juga dapat dilihat dari segi ekonomis yaitu masyarakat dapat mengolah sampah daur ulang tersebut menjadi sesuatu yang lebih ekonomis.

Evaluasi kebijakan MTR menilai efektifitas pelaksanaan dan dampak program. Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan (Dunn, 2003). Pelaksanaan kegiatan kebijakan MTR ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut belum berhasil baik, tetapi ada kalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Berdasarkan data Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa efektivitas yang belum baik dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran. Efektivitas merupakan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Efisiensi kebijakan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari pendanaan program. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien (Dunn, 2003). Gambaran tabel 2 menunjukkan belum efisien dalam pelaksanaan program gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dalam pelaksanaannya.

Kecukupan dalam kebijakan MTR dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003). Data Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa kecukupan yang belum baik masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi pemuasan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Hal ini berarti sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

Perataan dalam kebijakan MTR dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan MTR. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Di sini berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial memilah sampah basah dan sampah kering. Kriteria redistributif dirumuskan sebagai suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan. Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena kebijakan MTR merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Responsivitas dalam kebijakan MTR dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, tanggapan sasaran kebijakan MTR atas penerapan kebijakan tersebut. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003). Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan, dalam hal kebijakan MTR sudah terlaksana baik.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi

tujuan kebijakan MTR. Dunn (2003) menyatakan kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. Dampak kebijakan MTR sudah dirasakan baik oleh masyarakat, meskipun masih terdapat kendala utamanya pembangunan persepsi positif terhadap gerakan kebijakan MTR kelompok masyarakat pemuda.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Makassar Tidak Rantasa secara umum terlaksana baik dengan kendala pada faktor pemahaman masyarakat dan infra struktur yang masih kurang baik sehingga respon sebagian kecil masyarakat masih kurang baik. Penelitian ini merekomendasi penilaian kecocokan, menguji dan mengevaluasi tentang kebijakan MTR yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan tetapi memerlukan sikap tegas dari pemerintah kota menegakkan aturan tentang kebersihan dan persampahan. Dampak kebijakan MTR sudah dirasakan baik oleh masyarakat, meskipun masih terdapat kendala utamanya pembangunan persepsi positif terhadap gerakan kebijakan MTR kelompok masyarakat pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN (Putra Media Nusantara).
- Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Surat Keputusan Nomor 660.2/1087/Kep-V/2014 Tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik:Teori dan Proses (Edisi Revisi). Yogyakarta : Media Pressindo.